

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk menciptakan standar kehidupan, kecerdasan, dan kesejahteraan yang lebih adil dan merata bagi setiap orang serta untuk menyiapkan dasar-dasar yang kokoh untuk pembangunan di masa depan. Pembangunan ekonomi tidak selalu yang adil, ada kesenjangan pendapatan antar daerah yang merupakan salah satu masalah yang terjadi selama proses pembangunan ekonomi suatu negara. Beberapa wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, namun daerah lain tidak mengalami kemajuan dan perkembangan yang sama, akibatnya penduduk miskin meningkat di wilayah tersebut karena kekurangan sumber daya (Violin & Lutfi, 2022).

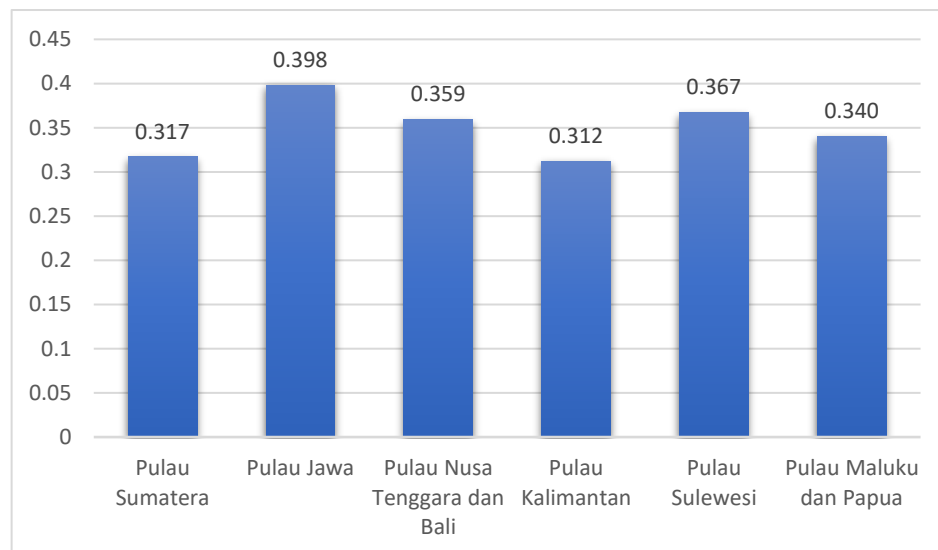
Salah satu masalah ekonomi yang menjadi perhatian serius di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan ini terjadi ketika pendapatan tidak merata di antara individu atau kelompok di suatu daerah. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Masalah ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah besar di Indonesia, meskipun pertumbuhan ekonominya relatif stabil. Ketimpangan pendapatan menunjukkan kesejahteraan suatu daerah (Rambey, 2018).

Menurut Todaro (dalam Kunenengan et al., 2023) ketimpangan pendapatan dapat menunjukkan adanya perbedaan pendapatan antara masyarakat di daerah maju dan tertinggal. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan komposisi penduduk,

sumber daya, dan karakteristik yang ada di berbagai daerah. Ketika ketimpangan pendapatan meningkat, ketidaksamaan dalam distribusi pendapatan masyarakat meningkat, kondisi seperti ini akan menyebabkan ketimpangan di masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dengan memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah.

Ketimpangan pendapatan di Indonesia diukur menggunakan gini rasio. Metode perhitungan indeks gini, juga dikenal sebagai koefisien gini yang dapat digunakan untuk mengetahui ketimpangan pendapatan. Nilai rasio gini yang semakin tinggi atau mendekati satu menunjukkan ketimpangan pendapatan yang tinggi, sedangkan nilai rasio gini yang lebih rendah atau mendekati nol menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata (Julihanza & Khoirudin, 2023).

Berikut perbandingan gini rasio pulau di Indonesia tahun 2021-2023.



Sumber: BPS, data diolah.

Gambar 1. 1 Perbandingan Gini Rasio Pulau di Indonesia Tahun 2021-2023 (%)

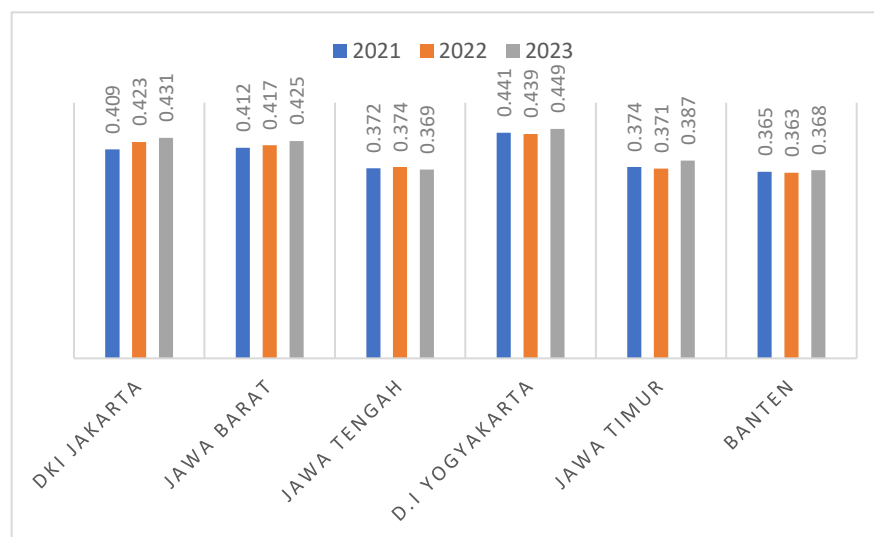
Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan gambaran ketimpangan pendapatan pulau di Indonesia dengan tahun terbaru yaitu 2021-2023, dimana enam pulau utama di Indonesia menunjukkan variasi dalam gini rasio yang berarti mencerminkan ketimpangan yang berbeda. Pulau Sumatera dengan nilai gini rasio sebesar 0,317%. Pulau Jawa dengan gini rasio sebesar 0,398%. Pulau Nusa Tenggara dan Bali dengan nilai gini rasio sebesar 0,359%. Pulau Kalimantan dengan nilai gini rasio sebesar 0,312%. Pulau Sulawesi dengan nilai gini rasio sebesar 0,367%. Kemudian Pulau Maluku dan Papua dengan nilai gini rasio sebesar 0,340%. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pulau Jawa karena berdasarkan gambar 1.1 ketimpangan pendapatannya tertinggi dan Pulau Jawa ini merupakan pusatnya perekonomian Indonesia.

Penelitian ini memilih ketimpangan pendapatan sebagai objek penelitian. Hal tersebut karena ketimpangan berpengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata dapat mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin. Dengan gini rasio tertinggi dibandingkan dengan lima pulau lain di Indonesia, hal ini menjadi dasar bagi penulis untuk meneliti ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa dengan faktor-faktor variabel lainnya yang dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan.

Sebagai pusat perekonomian di Indonesia, Pulau Jawa memiliki banyak dinamika ekonomi yang dapat memengaruhi pembagian pendapatan antar provinsi. Enam provinsi di Pulau Jawa ini memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda-beda. Pulau Jawa merupakan pusatnya kegiatan ekonomi dengan nilai kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto Indonesia tetapi ketimpangan pendapatan

antar wilayahnya masih terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antar provinsi. Faktor-faktor seperti akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, dan infrastruktur dapat berpengaruh terhadap ketidakmerataan ini. Pembangunan di Pulau Jawa juga belum merata disebabkan pertumbuhan ekonomi yang pesat di perkotaan sering kali tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan di daerah pedesaan sehingga menciptakan kesenjangan antar wilayah perkotaan dan pedesaan.

Berikut perkembangan gini rasio enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2021-2023.



Sumber: BPS, data diolah.

Gambar 1. 2 Perkembangan Gini Rasio Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2021-2023 (%)

Berdasarkan dari gambar 1.2 diketahui perkembangan gini rasio enam provinsi dari tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi. Gini rasio DKI Jakarta pada tahun 2021 sebesar 0,409%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan 2023 yaitu sebesar 0,423% dan 0,431%. DKI Jakarta memiliki penduduk yang sangat

heterogen, dimana mencakup golongan tinggi maupun rendah. Hal ini menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata, sehingga meningkatkan ketimpangan pendapatan. Gini rasio Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 sebesar 0,412%, kemudian pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,417% dan 0,425%. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat yang tidak merata, dimana pembangunan hanya terpusat di wilayah tertentu.

Gini rasio Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 0,372% dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 0,374%, kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,369% dimana pertumbuhan ekonomi di provinsi ini cukup signifikan, tetapi distribusi pendapatannya tidak merata karena tingkat Pendidikan dan infrastruktur yang kurang berkembang. Gini rasio D.I Yogyakarta pada tahun 2021 sebesar 0,441% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,439%, namun pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,449%. D.I Yogyakarta menjadi provinsi dengan gini rasio tertinggi di Pulau Jawa dimana pertumbuhan ekonomi yang pesat di sektor pariwisata dan pendidikan sehingga meningkatkan pendapatan kelas menengah dan atas, sementara kelas bawah tidak merasakan dampaknya.

Gini rasio Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 sebesar 0,374% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,371%, namun pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,387%. Penyebab ketimpangan di Jawa Timur meliputi perbedaan investasi, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di berbagai daerah. Gini rasio Provinsi Banten pada tahun 2021 sebesar 0,365% dan pada tahun 2022 mengalami

penurunan menjadi 0,363%, namun pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,368%. Provinsi Banten meskipun pertumbuhan ekonominya positif, tetapi distribusi pendapatannya tidak merata sehingga sebagian masyarakatnya tetap miskin.

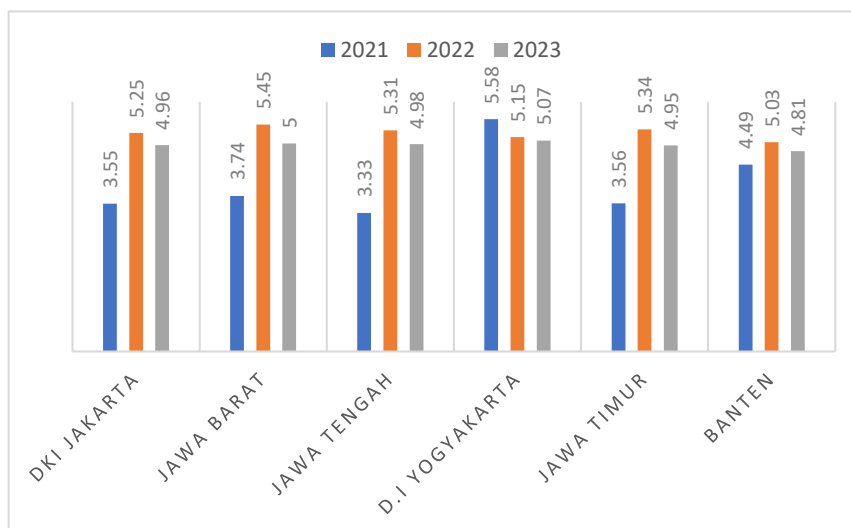
Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi masyarakat (Rahman & Putri, 2021). Pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Namun, pertumbuhan ekonomi yang cepat belum tentu dapat menghasilkan keberhasilan dalam pembangunan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berdampak terhadap ketimpangan pendapatan, karena pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan pemerataan (Wahyuni & Andriyani, 2022).

Berdasarkan gambar 1.3 dibawah perkembangan laju pertumbuhan ekonomi enam provinsi pada tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2022 meningkat dari 3,55% menjadi 5,25%. Namun, pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi kembali menurun menjadi 4,96% yang disebabkan oleh kondisi perekonomian global dan inflasi yang memengaruhi daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2022 meningkat dari 3,74% menjadi 5,45%. Namun, pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 5% yang disebabkan oleh pemanasan global dan tantangan dalam sektor industri dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2022 meningkat dari 3,33% menjadi 5,31% dan pada tahun 2023 melambat menjadi 4,98% yang

disebabkan oleh melemahnya konsumsi rumah tangga dan dipengaruhi oleh inflasi tinggi dan cuaca ekstrem yang memengaruhi sektor pertanian.

Pertumbuhan ekonomi D.I Yogyakarta pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan dari 5,58% menjadi 5,15% dan 5,07% yang disebabkan oleh ketidakpastian geopolitik dan dampak fenomena el nino yang memengaruhi produksi pertanian. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2022 meningkat dari 3,56% menjadi 5,34% dan tahun 2023 melambat menjadi 4,95% yang dipengaruhi oleh fluktuasi pasar internasional, lambatnya industri pengolahan, dan penurunan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi Banten pada tahun 2022 meningkat dari 4,49% menjadi 5,03% dan tahun 2023 melambat menjadi 4,81% dimana sektor jasa keuangan dan listrik, serta ekspor mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh faktor global.

Berikut perkembangan laju pertumbuhan ekonomi enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2021-2023.



Sumber: BPS, data diolah.

Gambar 1. 3 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2021-2023 (%)

Penelitian yang diteliti oleh Wijayanti & Aisyah (2022) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh Kunenengan et al. (2023) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah memerlukan bantuan pihak swasta dalam rangka penyediaan atau penanaman modal. Terdapat dua kategori dalam penanaman modal, yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Untuk meningkatkan ekonomi domestik di Pulau Jawa, penanaman modal asing diperlukan. Industri padat modal yang memiliki teknologi canggih dan tenaga kerja yang berpendidikan serta berpengalaman untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dari perusahaan dalam negeri adalah satu-satunya tujuan penanaman modal asing (Laut et al., 2020). Tetapi, investasi yang tidak merata antar daerah dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan (Harahap, 2022).

Berdasarkan gambar 1.4 di bawah penanaman modal asing enam provinsi pada tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi. Penanaman modal asing DKI Jakarta pada tahun 2021 sebesar 3.330,6 juta US\$, kemudian pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan menjadi 3.744,1 juta US\$ dan 4.830 juta US\$. Peningkatan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik perhatian investor. Sektor transportasi dan telekomunikasi menjadi kontributor utama investasi. Penanaman modal asing Provinsi Jawa Barat pada

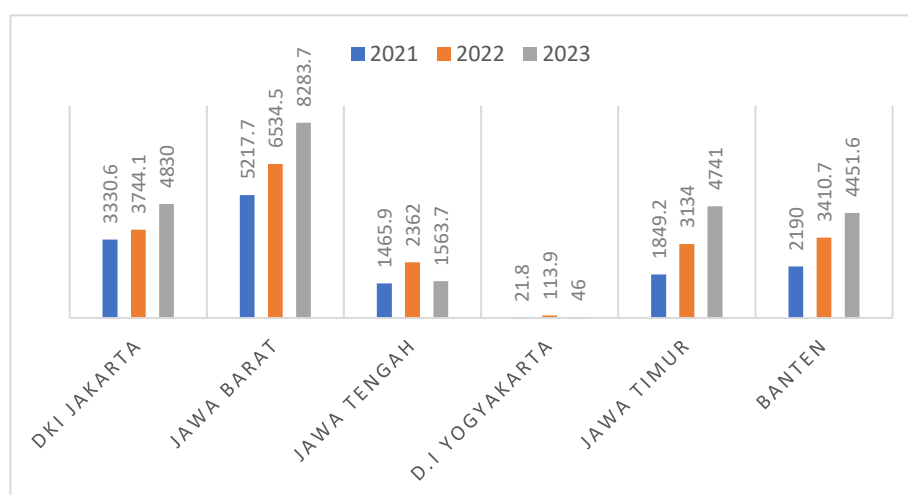
tahun 2021 sebesar 5.217,7 juta US\$, kemudian pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan menjadi 6.534,5 juta US\$ dan 8.283,7 juta US\$. Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi kerja sama antara pemerintah dan swasta, kemudian infrastruktur yang memadai dan tingginya produktivitas sumber daya manusia.

Penanaman modal asing Jawa Tengah pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari 1.465,9 juta US\$ menjadi 2.362 juta US\$, kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 1.563,7 juta US\$. Penurunan investasi asing ini dipengaruhi oleh dominasi sektor padat kerja, dampak pasar global, kompetensi dengan provinsi yang lain, dan kompleksitas regulasi perizinan. Pada tahun 2022 penanaman modal asing di D.I Yogyakarta mengalami kenaikan dari 21,8 juta US\$ menjadi 113,9 juta US\$, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi 46 juta US\$. Penurunan investasi asing ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ketidakpastian ekonomi global dan inflasi tinggi, infrastruktur yang terbatas serta persaingan dengan provinsi lain yang menawarkan insentif lebih menarik bagi investor.

Penanaman modal asing Jawa Timur pada tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami kenaikan dari 1.849,2 juta US\$ menjadi 3.134 juta US\$ dan 4.741 juta US\$. Peningkatan investasi asing ini dipengaruhi oleh hilirisasi sektor unggulan, perbaikan infrastruktur, serta kepercayaan investor terhadap potensi Jawa Timur. Penanaman modal asing Banten pada tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami kenaikan dari 2.190 juta US\$ menjadi 3.410,7 juta US\$ dan 4.451,6 juta US\$. Peningkatan investasi asing ini dipengaruhi oleh infrastruktur yang terus

berkembang dan sektor unggulan seperti sektor industri kimia dan farmasi serta perumahan menjadi pendorong utama investasi.

Berikut perkembangan penanaman modal asing enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2021-2023.



Sumber: BPS, data diolah

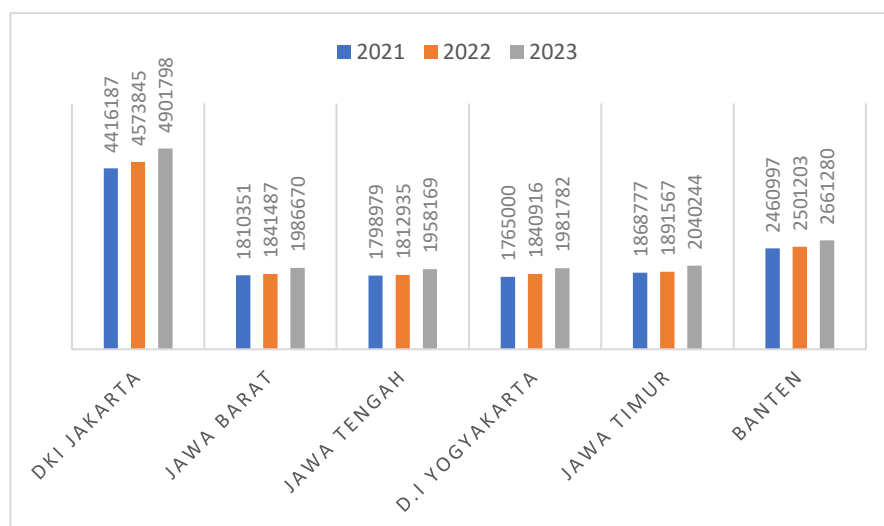
**Gambar 1. 4 Perkembangan PMA Enam Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2021-2023 (Juta US\$)**

Penelitian yang diteliti oleh Karimi et al. (2023) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan penanaman modal asing berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan penelitian yang telah diteliti oleh Rezk et al. (2022) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan penanaman modal asing berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Upah minimum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbedaan perekonomian, terutama antar daerah perkotaan dan pedesaan. Peningkatan upah minimum di setiap provinsi dianggap sebagai langkah strategis dalam mengurangi disparitas pendapatan (Julihanza & Khoirudin, 2023). Ketimpangan antar wilayah

juga dapat disebabkan oleh penetapan upah minimum provinsi yang tidak merata di seluruh provinsi. Upah minimum provinsi mungkin lebih tinggi di beberapa Provinsi dengan biaya hidup tinggi dibandingkan provinsi dengan biaya hidup rendah. Perbedaan ini dapat menyebabkan perbedaan pendapatan antar provinsi, dengan pekerja di provinsi dengan upah minimum provinsi lebih rendah dalam menghadapi kesulitan ekonomi yang lebih besar.

Berikut perkembangan upah minimum provinsi pada enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2021-2023.



Sumber: BPS, data diolah

**Gambar 1. 5 Perkembangan UMP Enam Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2021-2023 (Juta Rupiah)**

Berdasarkan gambar 1.5 diketahui upah minimum provinsi dari tahun 2021-2023 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Upah minimum provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami kenaikan dari Rp4.416.187 menjadi Rp4.573.845 dan Rp4.901.798. DKI Jakarta merupakan pusat perekonomian Indonesia, sehingga biaya hidup dan inflasi lebih tinggi

dibandingkan daerah lain. Upah minimum Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami kenaikan dari Rp1.810.351 menjadi Rp1.841.487 dan Rp1.986.670. Kenaikan upah minimum di Jawa Barat bertujuan untuk melindungi kesejahteraan buruh di tengah tantangan ekonomi. Kemudian upah minimum Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami kenaikan dari Rp1.798.979 menjadi Rp1.812.935 dan Rp1.958.169. Kenaikan upah minimum di Jawa Tengah ini merupakan upaya pemerintah untuk menyesuaikan upah dengan kondisi ekonomi yang berfluktuasi.

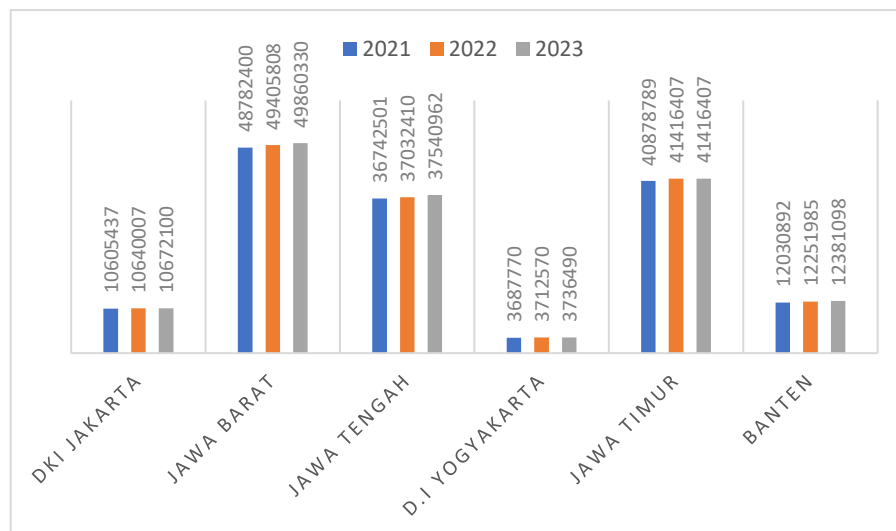
Upah minimum Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami kenaikan dari Rp1.765.000 menjadi Rp1.840.916 dan Rp1.981.782. Kenaikan upah minimum di D.I Yogyakarta untuk menjaga kesejahteraan buruh melalui kenaikan upah. Upah minimum provinsi Jawa Timur pada tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami kenaikan dari Rp1.868.777 menjadi Rp1.891.567 dan Rp2.040.244. Kenaikan upah minimum di Jawa Tengah untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian upah minimum Provinsi Banten pada tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami kenaikan dari Rp2.460.997 menjadi Rp2.501.203 dan Rp2.661.280. Kenaikan upah minimum di Banten merupakan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kesejahteraan pekerja, meskipun tantangan ekonomi tetap ada.

Penelitian yang diteliti oleh Astary et al. (2024) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh Pasoman & Maria

(2024) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan upah minimum provinsi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan pendapatan juga bisa dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Menurut teori Sukirno menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang terus menerus dan tidak terkendali akan berfungsi sebagai pendorong atau penghambat pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk sebagai faktor pendorong akan meningkatkan jumlah tenaga kerja dan memicu perluasan pasar barang dan jasa. Sedangkan jumlah penduduk sebagai faktor penghambat pembangunan, karena peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan penurunan produktivitas dan menciptakan pendapatan yang lebih rendah (Sugiarti & Erdkhadifa, 2023).

Berikut perkembangan jumlah penduduk enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2021-2023.



Sumber: BPS, data diolah

Gambar 1. 6 Perkembangan Jumlah Penduduk Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2021-2023 (Juta Jiwa)

Berdasarkan gambar 1.6 diketahui jumlah penduduk enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2021-2023 cenderung mengalami kenaikan. Jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 10.605.437 juta jiwa menjadi 10.640.007 juta jiwa dan 10.672.100 juta jiwa. DKI Jakarta merupakan pusat ekonomi dan peluang kerja sehingga banyak migrasi masuk, fasilitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur terus meningkat. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat dari tahun 2021, 2022 dan 2023 selalu terjadi peningkatan dari 48.782.400 juta jiwa menjadi 49.405.808 juta jiwa dan 49.860.330 juta jiwa. Perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan di Jawa Barat yang dapat meningkatkan kualitas hidup, sehingga lebih banyak orang yang tinggal dan menetap.

Kemudian jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2021, 2022 dan 2023 selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya dari 36.742.501 juta jiwa menjadi 37.032.410 juta jiwa dan 37.540.962 juta jiwa. Jumlah penduduk terus mengalami peningkatan karena banyak penduduk dari daerah lain yang mencari peluang kerja di Jawa Tengah. Jumlah penduduk D.I Yogyakarta dari tahun 2021, 2022 dan 2023 terjadi kenaikan setiap tahunnya dari 3.687.770 juta jiwa menjadi 3.712.570 juta jiwa dan 3.736.490 juta jiwa. Jumlah penduduk di D.I Yogyakarta mengalami kenaikan karena angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kematian dan juga banyak migrasi dari daerah lain.

Jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2021 sebesar 40.878.789 juta jiwa kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2022 sebesar 41.416.407 juta jiwa kemudian tahun 2023 sebesar 41.416.407 juta jiwa. Di Jawa Timur tingkat kelahiran tetap

tinggi dan mobilitas penduduk ke daerah perkotaan seperti Surabaya, yang menawarkan lebih banyak peluang ekonomi. Kemudian jumlah penduduk Provinsi Banten dari tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami kenaikan dari 12.030.892 juta jiwa menjadi 12.251.985 juta jiwa dan 12.381.098 juta jiwa. Kenaikan jumlah penduduk di Banten disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi dan banyaknya pendatang dari luar daerah.

Penelitian yang diteliti oleh Rizkia & Andriyani (2022) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan hasil penelitian yang diteliti oleh Al Aqilah et al. (2024) menyatakan bahwa hasil dari penelitian menunjukkan jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Penulis melihat terdapat *gap* (kesenjangan) dari uraian latar belakang masalah di atas, sehingga penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam. Hal yang menjadi daya tarik penulis melakukan penelitian ini, karena belum banyak yang meneliti variabel penanaman modal asing terhadap ketimpangan pendapatan enam provinsi di Pulau Jawa dengan rentang waktu yang terbaru yaitu tahun 2018-2023. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketimpangan Pendapatan Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing, upah minimum provinsi, dan jumlah penduduk secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2018-2023?
2. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing, upah minimum provinsi, dan jumlah penduduk secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2018-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing, upah minimum provinsi, dan jumlah penduduk secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2018-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing, upah minimum provinsi, dan jumlah penduduk secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2018-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing, upah minimum provinsi, dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2018-2023. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut dan memperkaya literatur yang ada.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai ketimpangan pendapatan dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam upaya menurunkan ketimpangan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pulau Jawa yang terdiri dari enam Provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Banten. Untuk pengambilan data melalui sumber dengan mengakses dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan pengajuan judul kepada Program Studi Ekonomi Pembangunan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) bimbingan, dilanjutkan dengan konsultasi dan proses kegiatan bimbingan. Adapun jadwal penelitian ini seperti tercantum pada:

Tabel 1. 1
Jadwal Penelitian

[illegible]